



Kebijakan dan program peningkatan kompetensi guru PAI dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di madrasah

Ayu Windarsih*, Tasman Hamami

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*24204012004@student.uin-suka.ac.id

Abstract

This research is motivated by the strategic role of the competence of Islamic Religious Education (PAI) teachers in improving the quality of madrasah education in Indonesia, but its implementation still faces various obstacles in the field. The purpose of this study is to analyze national education policies and the effectiveness of PAI teacher competency improvement programs in improving the quality of madrasah education, especially in the context of challenges in the 3T (Frontier, Outermost, and Disadvantaged) areas. The research method used is qualitative descriptive with a literature study approach and content analysis techniques to relevant policy documents and scientific literature. The results of the study show that policies such as the National Education System Law, the Regulation of the Minister of Religion Number 60 of 2015, the Teacher Professional Education Program (PPG), and the Independent Teaching Platform have provided the basis for strengthening the competence of PAI teachers, but their implementation still faces obstacles in the form of inequality of access to training, limited technological infrastructure, and low distribution of resources in the 3T area. In addition, the policy approach that tends to top-down causes the program to not fully comply with the contextual needs of madrasahs in the regions. The conclusion of this study emphasizes that improving the quality of madrasahs requires a more adaptive, inclusive, and local needs-based policy reformulation through strengthening School-Based Management (SBM), equitable access to teacher training, and effective infrastructure and madrasah leadership support so that improving the competence of PAI teachers can run more sustainably and fairly.

Keywords: PAI teacher competence; education policy; PPG program; madrasah quality; 3T region.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategis kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis kebijakan pendidikan nasional serta efektivitas program peningkatan kompetensi guru PAI dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah, khususnya dalam konteks tantangan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan teknik analisis isi terhadap dokumen kebijakan serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015, Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan Platform Merdeka Mengajar telah memberikan dasar penguatan kompetensi guru PAI, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa ketimpangan akses pelatihan, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta rendahnya pemerataan sumber daya di wilayah 3T. Selain itu, pendekatan kebijakan yang cenderung

top-down menyebabkan program belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kontekstual madrasah di daerah. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan mutu madrasah memerlukan reformulasi kebijakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis kebutuhan lokal melalui penguatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pemerataan akses pelatihan guru, serta dukungan infrastruktur dan kepemimpinan madrasah yang efektif agar peningkatan kompetensi guru PAI dapat berjalan lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: kompetensi guru PAI; kebijakan pendidikan; program PPG; mutu madrasah; wilayah 3T.

Pendahuluan

Peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan strategi kunci dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Guru PAI memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan internalisasi nilai-nilai keislaman peserta didik melalui keteladanan, pembiasaan, dan integrasi nilai-nilai agama dalam pembelajaran (Amin 2019). Pemerintah telah menyediakan kerangka regulatif melalui kebijakan pendidikan nasional, antara lain Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakui eksistensi pendidikan keagamaan, serta implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi dan kemandirian guru dalam mendesain kegiatan belajar (Masnu'ah, 2022). Kerangka regulatif ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan arah kebijakan yang mendukung penguatan peran dan profesionalitas guru PAI dalam sistem pendidikan nasional.

Namun demikian, pelaksanaan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru terus menemui hambatan yang signifikan, terutama menyangkut kesenjangan dalam akses dan implementasi di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidik di bidang 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) sering kali tidak memiliki kesempatan yang sama untuk pelatihan dan program Pendidikan Profesional Guru (PPG), disebabkan oleh infrastruktur dukungan yang tidak memadai, konektivitas Internet yang tidak dapat diandalkan, dan penyebaran kebijakan pemerintah yang tidak memadai (Tomasouw dkk. 2024). Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mardhatillah and Surjanti (2023) yang menunjukkan bahwa alokasi peluang pelatihan dan pembinaan guru sebagian besar terkonsentrasi di daerah perkotaan, sehingga menimbulkan disparitas kompetensi antardaerah. Mengingat penerapan Kurikulum Merdeka, kesulitan ini semakin terasa, karena kurikulum mengharuskan pendidik memiliki kapasitas untuk secara mandiri merancang pendekatan pedagogis yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sedangkan pendidik di wilayah 3T terus menghadapi hambatan signifikan terkait akses ke sumber daya teknologi, ketersediaan materi instruksional digital, dan penyediaan dukungan pengawasan akademik.

Selain itu, penggabungan teknologi yang tidak memadai dalam kerangka pedagogis menandakan kekurangan yang terus-menerus dalam kemahiran kompetensi digital di antara pendidik PAI, yang, pada kenyataannya, penting dalam lanskap pembelajaran kontemporer abad ke-21. Inisiatif pengembangan profesional yang dimaksudkan untuk dilakukan terus menerus sering berubah menjadi latihan formalistik belaka tanpa tindak lanjut atau pengawasan substansif, sehingga membuatnya tidak efektif dalam mendorong peningkatan komprehensif kemampuan guru (Anisah, 2025). Skenario ini

menggarisbawahi perlunya penilaian menyeluruh dan konfigurasi ulang kebijakan untuk memastikannya lebih relevan secara kontekstual, adil, dan selaras dengan persyaratan asli instruktur PAI, terutama dalam pengaturan madrasah pribadi dan di daerah 3T. Dalam hubungannya dengan menghadapi kesulitan dalam domain teknis, pendidik PAI juga dihadapkan dengan hambatan sistemik, khususnya hambatan yang timbul dari kerangka pendidikan, kebijakan, dan konteks kelembagaan yang belum cukup memfasilitasi kemajuan yang adil dari kompetensi guru. Tantangan sistemik ini mencakup tidak adanya kerangka peraturan adaptif, sumber daya pelatihan yang terbatas, pengawasan akademik yang tidak optimal, dan ketidaksetaraan dalam alokasi sumber daya dan infrastruktur di berbagai wilayah, terutama di madrasah swasta dan wilayah yang diklasifikasikan sebagai 3T (Lundeto 2023).

Di luar hambatan struktural tersebut, pendidik PAI saat ini dihadapkan dengan persyaratan kompetensi baru dalam konteks Revolusi Industri Keempat dan Masyarakat 5.0. Kemahiran pedagogis, yang mencakup kapasitas untuk mengonseptualisasikan, melaksanakan, dan menyebarluaskan konten pendidikan, merupakan fondasi penting bagi pendidik; Namun, itu tidak lagi memadai tanpa adanya kemampuan komprehensif untuk secara efektif memanfaatkan informasi teknologi. Pendidik diharuskan untuk menumbuhkan sumber daya pembelajaran digital, menerapkan metodologi berbasis proyek, dan memodifikasi strategi instruksional untuk menyelaraskan dengan karakteristik generasi digital yang semakin visual, interaktif, dan bergantung pada teknologi (Fahmi dkk. 2024). Kemahiran yang tidak memadai dalam kompetensi digital di antara pendidik PAI tertentu merupakan hambatan signifikan untuk pembentukan pengalaman pendidikan yang bermakna dan relevan secara kontekstual, terutama dalam lingkungan madrasah yang terus bersaing dengan akses terbatas ke sumber daya teknologi dan konektivitas internet. Akibatnya, peningkatan kompetensi pedagogis harus bersamaan dengan promosi literasi digital, di samping penanaman inovasi pendidikan yang responsif terhadap tuntutan dan karakteristik peserta didik yang berkembang di abad ke-21 (Rosfiani, 2025).

Kualitas pendidikan di madrasah tidak semata-mata bergantung pada kemahiran sumber daya manusia, khususnya pendidik, tetapi juga secara signifikan dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan dukungan infrastruktur yang memadai. Sumber daya nyata seperti ruang kelas yang sesuai, laboratorium, perpustakaan, dan akses ke teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan prasyarat penting untuk membina lingkungan pendidikan yang kondusif dan memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif. Di banyak madrasah, terutama yang terletak di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), ketidakcukupan fasilitas tersebut tetap menjadi hambatan substansial bagi inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan (Martani 2023). Hal ini menghasilkan tantangan bagi pendidik dalam penerapan pendekatan pedagogis yang aktif dan ditingkatkan teknologi. Selain itu, sumber daya teknologi termasuk konektivitas internet, peralatan digital, dan kerangka teknologi pendidikan sangat penting bagi pendidik dan pelajar untuk terlibat dengan beragam materi pembelajaran dengan cara yang fleksibel, inovatif, dan relevan secara kontekstual.

Pada dimensi nyata, kaliber madrasah sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS). Melalui MBS, madrasah diberikan otonomi untuk

merumuskan strategi peningkatan kualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kepala madrasah, pendidik, komite, dan pemangku kepentingan masyarakat dapat berkolaborasi dalam perumusan program terkait, pengelolaan sumber daya keuangan yang transparan, dan pembentukan budaya sekolah yang inklusif (Asmuni 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Fatihin dkk., (2023) menunjukkan bahwa implementasi MBS yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan sipil dalam lembaga pendidikan, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, dan mendorong inovasi berkelanjutan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan madrasah memerlukan pendekatan holistik, yang meliputi pengembangan sumber daya infrastruktur yang memadai dan fortifikasi tata kelola internal yang didasarkan pada prinsip-prinsip partisipatif dan kolaboratif

Budidaya budaya organisasi yang mendukung dalam pengaturan madrasah merupakan elemen penting yang harus diakui dalam inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Budaya organisasi mewujudkan nilai-nilai, tradisi, dan standar profesional yang ditegakkan oleh anggota lembaga pendidikan, sehingga membangun lingkungan kolektif dalam pelaksanaan peran dan tugas individu mereka. Ketika budaya kerja yang mapan dicirikan oleh kolaborasi, disiplin, dan komitmen terhadap kualitas, itu menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk kinerja optimal dan inovasi pendidikan (Santosa 2022). Dalam kerangka madrasah, budaya organisasi yang kuat memiliki potensi untuk meningkatkan motivasi pendidik, memperkuat rasa komunitas, dan memberi insentif kepada pendidik untuk memberikan pengalaman belajar yang berdampak. Studi empiris menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang memelihara yang ditandai dengan komunikasi transparan dan suasana kolaboratif dapat secara signifikan meningkatkan profesionalisme dan komitmen pendidik (Huda 2021). Aspek ini memiliki signifikansi khusus bagi guru PAI, yang memikul tanggung jawab ganda dalam memberikan konten pendidikan sambil secara bersamaan mendorong pengembangan karakter dan nilai-nilai spiritual dalam siswa mereka.

Sebuah penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh Abdullah (2019) menunjukkan bahwa budaya organisasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip persahabatan timbal balik, disiplin, dan akuntabilitas berdampak positif pada efektivitas pelaksanaan inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas madrasah. Lebih lanjut, Arifin dkk., (2023) berpendapat bahwa budidaya budaya organisasi yang konstruktif dapat meningkatkan sinergi kolaboratif antara para pemimpin madrasah, pendidik, dan tenaga pendidikan dalam pencapaian tujuan terpadu. Akibatnya, budaya organisasi yang kuat tidak hanya memelihara lingkungan kerja yang mendukung tetapi juga merupakan landasan penting dalam pembentukan madrasah yang terhormat dan kompetitif. Peningkatan kemampuan pedagogis secara rumit dan substansional berkorelasi dengan peningkatan kualitas pendidikan madrasah. Keahlian pendidik, khususnya yang mengajar Pendidikan Agama Islam (PAI), berfungsi sebagai kriteria penting dalam mengevaluasi kualitas kerangka pendidikan serta pencapaian standar kualitas dalam lembaga pendidikan. Dikatakan bahwa kualitas instruktur PAI memberikan dampak langsung pada efektivitas pengalaman pendidikan dan perkembangan moral siswa dalam madrasah (Nurfuadi 2020). Namun, kemanjuran program pengembangan pendidik tetap penuh dengan berbagai tantangan. Jelaslah bahwa sebagian besar upaya pelatihan

pendidik ditandai oleh tingkat kekakuan dan kekurangan dalam keberlanjutan, akibatnya gagal membuat dampak yang cukup besar pada peningkatan komprehensif kemahiran pedagogis. Elemen penting yang mengintensifkan masalah ini adalah tidak adanya sistem penilaian dan bimbingan pasca-pelatihan yang terorganisir dan abadi (Muhammad dkk., 2024).

Selain itu, parameter yang terkait dengan kemahiran teknologi menimbulkan hambatan yang cukup besar. Sunarya (2024) menekankan pentingnya memasukkan teknologi informasi ke dalam pelatihan pendidik PAI untuk secara mahir memenuhi kebutuhan pendidikan abad ke-21. Namun demikian, dalam aplikasi praktis, aksesibilitas ke teknologi dan kompetensi digital instruktur di berbagai wilayah, terutama yang dikategorikan sebagai 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), terus sangat dibatasi. Kendala ini berfungsi sebagai hambatan bagi aktualisasi lingkungan pendidikan yang produktif, inovatif, dan terintegrasi teknologi. Akibatnya, upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pendidik PAI harus mempertimbangkan unsur-unsur seperti motivasi untuk pengembangan profesional, efektivitas kerangka evaluatif, dan akses yang adil ke sumber daya teknologi, sehingga memastikan bahwa inisiatif yang dilaksanakan secara signifikan meningkatkan kualitas pendidikan madrasah secara keseluruhan.

Berdasarkan kesenjangan yang telah diidentifikasi, penelitian ini secara khusus memfokuskan diri pada analisis kebijakan dan program peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam hubungannya dengan mutu pendidikan madrasah. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji secara kritis efektivitas berbagai program, termasuk pelatihan profesional dan pemanfaatan platform digital, dalam meningkatkan kapasitas pedagogik, profesional, dan teknologi guru secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini memberikan perhatian mendalam pada konteks implementasi di lapangan, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang selama ini menghadapi kendala keterbatasan akses pelatihan, infrastruktur pendukung yang tidak memadai, serta kurangnya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan mengeksplorasi faktor penghambat dan pendukung tersebut, penelitian ini berupaya menyajikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan implementasi serta merumuskan rekomendasi strategi yang adaptif dan kontekstual bagi para pemangku kepentingan di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru PAI, serta kontribusinya terhadap penguatan mutu pendidikan madrasah secara menyeluruh. Melalui metode ini, peneliti mengkaji sumber-sumber literatur sebagai dasar pengembangan kerangka konseptual tanpa terikat pada data empiris lapangan secara langsung (Adlini dkk. 2022).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan literatur yang relevan, mencakup artikel jurnal, dokumen kebijakan resmi pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang membahas: (1) kebijakan pendidikan nasional terkait

kompetensi guru PAI: (2) program-program peningkatan kompetensi yang telah dijalankan; dan (3) kajian aspek dan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan dimadrasah khususnya diwilayah 3T.

Data dikumpulkan dengan cara mengakses sumber-sumber literatur yang relevan, baik secara digital maupun cetak. Literatur ini mencakup penelitian terdahulu yang membahas mutu/ kualitas dalam pendidikan, khususnya dalam pengembangan kompetensi guru di madrasah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Peneliti melakukan identifikasi, pengelompokan, dan interpretasi data berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi efektivitas program kompetensi guru di wilayah 3T. Untuk menjamin keabsahan data, diterapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengevaluasi informasi dari berbagai literatur yang kredibel untuk meminimalkan bias. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan, serta memberikan rekomendasi strategi yang kontekstual dan berkelanjutan bagi pengelola madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan kompetensi pendidik.

Hasil dan Pembahasan

A. Kebijakan peningkatan mutu madrasah

Peningkatan kualitas madrasah merupakan komponen penting dalam kemajuan pendidikan nasional, dengan tujuan membangun lembaga pendidikan yang berkaliber tinggi, inklusif, dan relevan dengan tuntutan masyarakat kontemporer. Serangkaian kebijakan telah dirancang untuk memfasilitasi peningkatan kualitas ini. Pertama, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pengakuan formal pendidikan agama dan madrasah sebagai elemen integral dari kerangka pendidikan nasional. Kedua, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 60 Tahun 2015 tentang kurikulum madrasah mengamanatkan penggabungan kurikulum umum dengan ilmu agama dalam struktur pedagogis pendidikan madrasah. Ketiga, pemerintah telah menginisiasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Platform Pengajaran Independen sebagai langkah untuk meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogis para pendidik, termasuk mereka yang mengajar Pendidikan Agama Islam (PAI) (Powa dkk., 2023). Selain itu, kebijakan digitalisasi madrasah yang difasilitasi oleh pemanfaatan alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di samping akreditasi berbasis kualitas, merupakan mekanisme yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail dkk., (2024) menunjukkan bahwa Program Pengembangan Profesional (PPG) menghasilkan hasil yang menguntungkan dalam menambah kompetensi pedagogis pendidik PAI, terutama dalam bidang desain dan evaluasi instruksional. Namun demikian, pelaksanaan inisiatif ini sering menghadapi hambatan signifikan yang timbul selama proses implementasi.

Tantangan utama yang sering dihadapi berkaitan dengan perumusan kebijakan yang bersifat *top-down*. Kebijakan tersebut dirancang oleh otoritas yang lebih tinggi tanpa keterlibatan madrasah sebagai pelaksana di lapangan. Hal ini sering mengakibatkan kebijakan yang diberlakukan tidak cukup selaras dengan kebutuhan khas madrasah.

Madrasah memiliki karakteristik yang berbeda dari sekolah umum, seperti penerapan kurikulum ganda, keterbatasan sumber daya, serta dominasi madrasah swasta sering mengalami layanan pendidikan Islam (Iskandar 2019). Misalnya, madrasah swasta sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan kebijakan yang tidak mempertimbangkan keterbatasan dana, sarana, tenaga pendidik, dan akses teknologi. Kebijakan yang tidak melibatkan pemangku kepentingan di tingkat madrasah dapat menimbulkan jarak antara desain kebijakan dan kondisi nyata di lapangan. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan peningkatan mutu madrasah (Supa'at 2016).

Selain itu, perbedaan distribusi dan aksesibilitas sumber daya pendidikan menjadikan hambatan penting dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, terutama dalam program pelatihan guru dan sertifikasi. Program pemerintah yang mencakup pelatihan, sertifikasi guru, dan bantuan infrastruktur sering belum tersebar secara merata. Madrasah swasta dan madrasah yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) sering mengalami kesenjangan akses terhadap program peningkatan mutu yang dikelola oleh pemerintah. Wilayah 3T merupakan daerah yang menghadapi berbagai keterbatasan pembangunan akibat faktor geografis, sosial, ekonomi, serta rendahnya akses terhadap layanan dasar. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024, suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal berdasarkan enam kriteria, yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, serta karakteristik daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 62 kabupaten daerah tertinggal yang tersebar di 11 provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Serta Papua (Republik Indonesia, 2020).

Daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik permasalahan yang relatif sama, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, sulitnya akses transportasi, rendahnya konektivitas internet, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Pada wilayah kepulauan seperti Kepulauan Mentawai, Maluku, Maluku Utara, dan sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur, kondisi geografis menyebabkan biaya distribusi layanan pendidikan menjadi lebih tinggi dan akses terhadap program peningkatan kompetensi guru menjadi lebih terbatas. Sementara itu, wilayah pedalaman seperti sebagian daerah di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua menghadapi hambatan berupa keterbatasan jaringan komunikasi, sarana pendidikan, serta sulitnya mobilitas tenaga pendidik (Falah & Hadna, 2022). Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan madrasah, termasuk pengembangan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI), karena guru di wilayah 3T sering mengalami kesulitan dalam mengikuti pelatihan profesional, Pendidikan Profesi Guru (PPG), maupun program pengembangan berbasis teknologi digital. Selain itu, keterbatasan perangkat teknologi, akses internet, serta komunitas profesional seperti MGMP dan KKG menyebabkan kesempatan guru PAI di wilayah 3T untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, dan digital tidak selalu setara dengan guru di wilayah perkotaan (Hermawan dkk., 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan peningkatan mutu madrasah di wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan kompetensi guru, tetapi juga dipengaruhi oleh ketimpangan pembangunan wilayah yang berdampak pada terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pengembangan profesional guru. Faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ini adalah keterbatasan infrastruktur pendukung di wilayah 3T, seperti sarana transportasi, konektivitas internet, perangkat digital, dan fasilitas pembelajaran. Ketimpangan tersebut juga terlihat dalam distribusi pelatihan guru yang masih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Sementara itu, madrasah di daerah terpencil dan madrasah swasta masih menghadapi kesulitan untuk memperoleh kesempatan pelatihan yang setara (Sukaesih, 2025).

Kondisi ini diperkuat oleh data Kementerian Agama Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023 pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp73 miliar untuk tunjangan khusus bagi 9.043 guru dan tenaga kependidikan RA dan madrasah yang bertugas di wilayah 3T sebagai bentuk afirmasi terhadap keterbatasan yang mereka hadapi (Kementrian Agama, 2023). Selanjutnya, pada tahun 2024 Kementerian Agama kembali melaksanakan berbagai program penguatan kompetensi bagi guru dan kepala madrasah di wilayah 3T melalui pelatihan yang diselenggarakan di beberapa provinsi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan madrasah di daerah tertinggal. Program tersebut dilaksanakan di beberapa wilayah, antara lain Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Merauke, dan Maluku (Kementrian Agama, 2024).

Pendidik PAI yang bertugas di madrasah menghadapi tantangan kurikulum bercabang. Mereka harus mengelola pendidikan umum dan pendidikan agama secara bersamaan. Kondisi ini sering menimbulkan persoalan dalam alokasi waktu, penguasaan materi, dan strategi pembelajaran. Selain itu, pelatihan yang belum selalu relevan dengan konteks nyata madrasah dapat menyebabkan guru kurang siap menghadapi persoalan pedagogis yang kompleks. Keterbatasan media pembelajaran dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal juga menghambat upaya peningkatan kualitas pembelajaran PAI (Muthmainnah, 2024). Kebijakan yang tidak mempertimbangkan keragaman latar belakang guru, kemampuan digital, dan kondisi madrasah akan menjadi hambatan dalam peningkatan kompetensi guru PAI.

Madrasah juga sering menghadapi keterbatasan otonomi dalam merumuskan kebijakan internal. Hal ini terjadi karena kebijakan pendidikan masih banyak ditentukan secara terpusat oleh pemerintah pusat. Sentralisasi kebijakan dapat membatasi kemampuan madrasah untuk beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan lokal. Padahal, setiap madrasah memiliki kondisi, sumber daya, dan tantangan yang berbeda (Rifa'i 2017). Keterbatasan otonomi juga dapat menghambat pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan realitas sosial dan budaya masyarakat sekitar. Jika madrasah tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, maka peningkatan mutu pendidikan akan sulit berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih terdesentralisasi perlu dikembangkan agar madrasah memiliki ruang yang lebih besar untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan lokal (Aini 2022).

Pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu madrasah tidak hanya menghadapi hambatan teknis, tetapi juga hambatan desain kebijakan. Banyak kebijakan belum cukup responsif terhadap kebutuhan nyata madrasah di lapangan. Karena itu, reformulasi kebijakan perlu dilakukan secara lebih adaptif, kontekstual, dan partisipatif. Reformulasi ini penting terutama bagi madrasah swasta dan madrasah di wilayah 3T yang paling rentan mengalami kesenjangan mutu (Supa'at 2016). Kebijakan peningkatan mutu madrasah harus memperhatikan pemerataan akses, pemberdayaan otonomi madrasah, penguatan infrastruktur pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta dukungan khusus bagi wilayah yang menghadapi hambatan geografis dan sosial. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pendidikan madrasah dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan Islam secara nasional.

B. Strategi implementasi guru PAI

Pendidik yang mengkhususkan diri dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) menempati posisi penting dalam pelaksanaan inisiatif peningkatan kompetensi yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Berfungsi sebagai agen utama di dalam kelas, pendidik PAI ditugaskan tidak hanya dengan transmisi teoritis konten Islam tetapi juga dengan implementasi praktis kebijakan yang ditujukan untuk pengembangan kapasitas profesional, pedagogis, dan teknologi. Dalam kerangka kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, strategi yang digunakan oleh pendidik PAI dapat diperiksa melalui berbagai dimensi kritis yang dilakukan secara kohesif untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut secara efektif mempengaruhi kualitas hasil pendidikan (Khotimah, 2024).

Dimensi pedagogis merupakan elemen penting dalam peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh pendidik PAI. Sangat penting bahwa pendidik PAI tidak hanya menunjukkan penguasaan atas konten instruksional tetapi juga menunjukkan kemahiran dalam mengadopsi metodologi pedagogis kontekstual dan berpusat pada siswa yang didasarkan pada nilai-nilai karakter yang selaras dengan tuntutan masyarakat kontemporer. Pendekatan ini dioperasionalkan melalui penerapan paradigma pembelajaran aktif, seperti pembelajaran berbasis proyek, yang memberi siswa kesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran pengalaman melalui proyek yang berkaitan dengan konteks kehidupan nyata (Azevedo dkk. 2025). Selain itu, pemanfaatan metodologi dialogis dalam transmisi nilai-nilai agama sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Islam dalam lingkup keberadaan sehari-hari, di samping kultivasi kebiasaan moral melalui indoktrinasi di dalam dan di luar lingkungan kelas. Pendidik PAI juga diharapkan berfungsi sebagai contoh integritas moral dan spiritual, sehingga memungkinkan siswa untuk mengamati manifestasi nyata dari nilai-nilai yang dianut dalam Islam (Irmawati 2024). Akibatnya, peningkatan kompetensi pedagogis pendidik PAI sangat bergantung pada kapasitas mereka untuk menerapkan pendekatan yang tidak hanya kuat secara teoritis tetapi juga dapat diterapkan secara praktis dan relevan dengan konteks sosial-budaya siswa dalam madrasah.

Dalam era digital kontemporer, dimensi teknologi telah muncul sebagai hal penting dalam memfasilitasi pelaksanaan strategi yang bertujuan meningkatkan kompetensi

pendidik PAI. Dalam lanskap digital yang terus berubah ini, pendidik PAI harus memiliki kemampuan untuk secara efektif mengintegrasikan teknologi ke dalam proses instruksional. Kebijakan penting yang mendukung inisiatif ini adalah penggabungan alat digital dalam pedagogi, yang diaktualisasikan melalui platform seperti *Merdeka Teaching Platform*, *Sparkol VideoScribe*, dan berbagai aplikasi interaktif yang dirancang khusus untuk membuat pengalaman belajar lebih menawan dan berkhasiat (Adim, 2024). Penggunaan teknologi tersebut secara bersamaan mendukung kemajuan literasi digital, yang merupakan persyaratan mendasar dalam konteks Masyarakat 5.0. Dengan memanfaatkan teknologi, pendidik PAI memungkinkan untuk menyampaikan konten instruksional dengan cara yang lebih disesuaikan dan relevan dengan preferensi visual dan interaktif generasi digital. Misalnya, melalui pemanfaatan aplikasi multimedia, konten video, dan platform pendidikan Online, pendidik PAI dapat menyajikan materi instruksional dengan cara yang tidak hanya lebih menarik tetapi juga dapat diakses oleh siswa kapan saja dan dari lokasi mana pun (Renol, 2025). Namun demikian, penerapan yang efektif dari teknologi ini memerlukan pengembangan profesional berkelanjutan bagi para pendidik, terutama di wilayah yang ditandai dengan akses terbatas ke perangkat digital dan konektivitas internet.

Strategi untuk meningkatkan kompetensi pendidik PAI, baik yang dilaksanakan secara mandiri atau kolaboratif, merupakan upaya penting dalam memperkuat kapasitas profesional mereka. Diantisipasi bahwa pendidik PAI tidak hanya akan bergantung pada pelatihan formal yang diprakarsai oleh badan pemerintah atau lembaga pendidikan, tetapi juga akan terlibat secara proaktif dalam beragam sesi pelatihan, lokakarya, dan platform diskusi, seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Konsultasi Guru Subjek (MGMP). Platform ini memberi pendidik kesempatan untuk bertukar pengalaman, memperbarui pengetahuan, dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam proses pendidikan (Aisyah, 2025). Selain itu, forum seperti KKG dan MGMP memfasilitasi peningkatan kemampuan kolaboratif di antara para pendidik, memungkinkan mereka untuk merumuskan strategi pendidikan yang lebih baik yang didasarkan pada hasil musyawarah kolektif. Meskipun partisipasi terbatas dalam forum semacam itu, terutama di wilayah 3T, inisiatif semacam ini sangat penting untuk mempercepat pengembangan profesional pendidik yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif para pendidik dalam forum ini mencerminkan dedikasi mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meskipun kendala sumber daya dan infrastruktur di daerah terpencil sering menghadirkan hambatan yang signifikan (Kayati 2020).

Secara keseluruhan, keberhasilan strategi implementasi ini secara signifikan bergantung pada hubungan sinergis antara peran pendidik dan penyediaan dukungan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan otentik yang diamati dalam praktik. Kebijakan yang mengadvokasi peningkatan kompetensi yang komprehensif mencakup dimensi pedagogis, teknologi, dan profesional cenderung menghasilkan implementasi yang lebih manjur. Pendidik PAI beroperasi tidak hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai agen transformatif yang memiliki kapasitas untuk mengubah kebijakan menyeluruh menjadi praktik pendidikan yang relevan, inovatif, dan berkualitas tinggi (Nasrah dkk., 2025). Akibatnya, memperkuat strategi implementasi ini melalui

dukungan metodologi dan kebijakan terdesentralisasi sangat penting dalam mewujudkan pendidikan madrasah yang unggul dan berkelanjutan.

C. Efektivitas program peningkatan kompetensi guru PAI

Program peningkatan kompetensi pendidik Pendidikan Agama Islam (PAI) berfungsi sebagai mekanisme penting dalam fortifikasi sistemik kerangka pendidikan madrasah. Pemerintah, melalui upaya kolaboratif Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, telah melaksanakan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk menambah kemampuan profesional pendidik PAI. Peningkatan ini dicapai melalui jalur sertifikasi formal seperti Pendidikan Profesional Guru (PPG), pelatihan berbasis teknologi, dan integrasi platform digital, termasuk Merdeka *Teaching Platform* (PMM). Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk memberdayakan pendidik PAI untuk memberikan proses instruksional yang relevan, inovatif, dan dapat disesuaikan dengan atribut pelajar abad ke-21, yang dicirikan oleh keterlibatan aktif dan kemahiran teknologi mereka.

Salah satu program teladan yang berfungsi sebagai landasan untuk peningkatan kualitas adalah PPG, yang mengintegrasikan fortifikasi kerangka teoritis dengan pembelajaran pengalaman dalam pengaturan praktis. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pedagogis di dalam kelas dengan menambah kompetensi pendidik dalam perencanaan instruksional yang efektif, penilaian, dan manajemen kelas. Penelitian yang dilakukan oleh Mardhatillah and Surjanti (2023) menunjukkan bahwa alumni program PPG di bidang PAI menunjukkan kemajuan yang cukup besar di ketiga domain tersebut. Augmentasi ini juga secara positif terkait dengan kompetensi digital melalui pelatihan dalam pemanfaatan instrumen interaktif seperti *Sparkol VideoScribe*, *Canva*, dan Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS), yang memberdayakan pendidik untuk menyampaikan konten dengan cara yang inventif dan merangsang. Selain itu, keberadaan Platform Pengajaran Merdeka memberi para pendidik otonomi untuk terlibat dalam studi mandiri dan mengakses sumber daya yang berkaitan dengan realitas kontekstual madrasah (M. Munif dkk. 2024).

Namun demikian, keberhasilan saat ini dari inisiatif tersebut belum mencapai tingkat yang optimal. Beberapa kendala signifikan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kompetensi guru PAI mencakup keterbatasan mengenai keberlanjutan pelatihan dan kesenjangan akses, terutama di wilayah 3T (*Leading, Outlying, dan Lagging*). Masalah kritis adalah metodologi pelatihan, yang sering menunjukkan pendekatan “satu arah” karena kurangnya tindak lanjut. Situasi ini mengakibatkan pendidik berjuang untuk secara konsisten mengintegrasikan pengetahuan yang baru diperoleh ke dalam praktik pengajaran sehari-hari mereka. Dengan tidak adanya pengawasan akademis dan pendampingan sebaya yang gigih, kompetensi yang diperoleh cenderung mandek dan gagal berkembang. Akibatnya, penggabungan les yang berkelanjutan sangat penting untuk memfasilitasi transformasi asli dalam praktik pedagogis di dalam kelas (Hernandez, 2024).

Disparitas dalam akses ke infrastruktur merupakan faktor signifikan yang menghambat kemandirian program pendidikan di daerah terbelakang. Herry Sanoto dkk.,(2021) menjelaskan bahwa pendidik PAI yang beroperasi di wilayah 3T menghadapi hambatan sistemik yang ditandai dengan konektivitas internet yang tidak memadai dan kekurangan perangkat teknologi yang memadai. Situasi ini secara

langsung menghalangi pendidik untuk terlibat dalam pelatihan Online atau memanfaatkan aplikasi digital, yang merupakan komponen integral dari kebijakan pendidikan kontemporer. Sebagai langkah perbaikan, sangat penting bagi pemerintah untuk menerapkan peningkatan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur teknologi di wilayah 3T, bersamaan dengan menawarkan alternatif pelatihan offline yang mempertahankan standar berkualitas tinggi sambil memastikan aksesibilitas tanpa ketergantungan pada konektivitas internet.

Selain aspek teknis, pentingnya materi instruksional memerlukan revisi yang lebih menyeluruh. Banyak pendidik mengartikulasikan kekhawatiran mengenai generalisasi konten pelatihan yang berlebihan, berpendapat bahwa itu gagal mengakomodasi kebutuhan khusus madrasah, karakteristik unik peserta didik, dan lingkungan budaya yang beragam dari lembaga pendidikan (Hidayat, 2025). Suradi (2023) berpendapat bahwa kelebihan konten generik menghalangi kapasitas pendidik untuk mengontekstualisasikan pengetahuan ilmiah sejalan dengan tantangan khusus yang dihadapi di lapangan. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting bagi koordinator program untuk secara aktif melibatkan pendidik dalam perencanaan strategis dan pengembangan modul instruksional, sehingga memastikan bahwa konten yang disampaikan tidak hanya lebih praktis tetapi juga selaras dengan kebutuhan asli yang ada dalam lingkungan madrasah.

Sebagai langkah perbaikan, inisiatif masa depan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik PAI harus dirumuskan dengan kerangka kerja yang lebih fleksibel yang disesuaikan dengan persyaratan disiplin yang berbeda. Pengembangan profesional tidak boleh dianggap sebagai tugas wajib sementara; sebaliknya, itu harus dianggap sebagai perjalanan pendidikan berkelanjutan yang terintegrasi dengan mulus dengan pengawasan akademik, bimbingan kolaboratif, dan mekanisme umpan balik sistematis. Penataan ulang desain program yang lebih kohesif yang menggabungkan dukungan dari infrastruktur digital, pendampingan berkelanjutan, dan relevansi materi lokal akan menjadi sangat penting dalam menumbuhkan pendidik PAI yang mahir, inovatif, dan dilengkapi untuk memberikan pengalaman pendidikan berkualitas tinggi bagi peserta didik di madrasah.

D. Dukungan kebijakan dan manajemen sekolah

Kualitas pendidikan madrasah tidak semata-mata bergantung pada kualitas inisiatif pelatihan guru, tetapi juga secara signifikan dipengaruhi oleh dukungan substansial kebijakan pendidikan nasional dan kemandirian tata kelola internal lembaga. Kebijakan nasional harus menyediakan kerangka kerja manajerial yang fleksibel di samping bantuan operasional konkret untuk setiap entitas pendidikan dalam pelaksanaan inisiatif peningkatan kompetensi guru PAI (Acep dkk., 2017). Akibatnya, kebijakan yang dilaksanakan harus inklusif dan selaras dengan realitas di lapangan, mencakup aspek-aspek seperti alokasi sumber daya, pengembangan infrastruktur, dan pembentukan mekanisme yang memfasilitasi implementasi efektif kebijakan tersebut oleh para pemimpin madrasah dan pendidik.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pemberlakuan kebijakan ini terutama diamati di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Dalam hal ini, akses terbatas ke peluang pelatihan, kurangnya infrastruktur digital, bersama dengan tingkat

pembinaan profesional yang tidak memadai merupakan hambatan sistemik abadi yang belum ditangani secara komprehensif. Ini menunjukkan bahwa, terlepas dari peraturan yang mengatur pengembangan kompetensi, konektivitas internet yang andal dan sumber daya dukungan tambahan dianggap sebagai kemewahan daripada ketentuan standar. Mengingat skenario ini, pengembangan kebijakan yang lebih mudah beradaptasi, peka konteks, dan afirmatif sangat penting untuk memastikan bahwa inisiatif yang bertujuan meningkatkan kompetensi guru disebarluaskan dengan cara yang adil dan seragam (Fang & Xueyun 2025).

Sebagai instrumen strategis, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan kebijakan nasional dengan realitas operasional di tingkat madrasah. MBS memberi administrator madrasah PAI dan pendidik kebebasan untuk menyesuaikan inisiatif peningkatan kompetensi sesuai dengan karakteristik lokal dan persyaratan berbeda dari institusi. Mengingat heterogenitas geografis dan kesenjangan sumber daya manusia, otonomi ini sangat penting, terutama bagi madrasah yang terletak di daerah 3T yang sering kekurangan bantuan langsung dari pemerintah pusat. Melalui kerangka MBS, madrasah diberikan platform inovasi untuk mengatur kebijakan internal, sehingga memastikan bahwa pengembangan kompetensi guru dipertahankan pada tingkat yang optimal meskipun ada kendala (Listanto, 2022).

Pelaksanaan efektif inisiatif *Management-Based Schooling* (MBS) ini sangat dibentuk oleh kompetensi kepemimpinan kepala madrasah. Seorang kepala madrasah yang memiliki visi yang kuat dan keterampilan manajerial yang mahir mampu membina lingkungan kerja yang mempromosikan kemajuan profesi guru (Supangat 2022). Studi yang dilakukan oleh Khoriah (2025) menetapkan bahwa kepemimpinan transformasional, partisipasi aktif pemangku kepentingan pendidikan, dan budaya organisasi yang mempromosikan kolaborasi secara substansif berdampak pada efektivitas MBS. Administrator pendidikan yang secara mahir memberdayakan para profesional pengajaran dan menumbuhkan saluran komunikasi yang kuat lebih mungkin untuk mencapai peningkatan keberhasilan dalam mengubah kebijakan luas menjadi inisiatif nyata yang meningkatkan standar pendidikan.

Namun demikian, keberhasilan Sistem Perilaku Terkelola (MBS) bergantung pada penguatan kebijakan pusat, yang harus mencakup pelatihan kepemimpinan komprehensif untuk administrator madrasah, fortifikasi kerangka kelembagaan, dan alokasi insentif yang didasarkan pada metrik kinerja. Sangat penting untuk memastikan bahwa para pemimpin dalam unit pendidikan memiliki kompetensi yang sepadan untuk secara efektif menjalankan otonomi tersebut. Penyediaan insentif berbasis kinerja diantisipasi untuk menggembeleng kepala madrasah dan pendidik untuk bertahan dalam upaya inovatif mereka yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan (Aini 2022). Selain itu, kolaborasi dengan pemangku kepentingan utama, termasuk komite madrasah, tokoh orang tua, dan komunitas yang berdekatan, akan menambah ekosistem pendidikan yang partisipatif dan abadi.

Kesimpulannya, peningkatan kualitas pendidikan madrasah merupakan produk dari interaksi antara kebijakan makro (nasional) dan penguatan tingkat mikro (manajemen kelembagaan). Program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik PAI tidak akan mewujudkan hasil yang optimal tanpa dukungan struktural yang diperlukan

melalui kebijakan afirmatif, sumber daya keuangan khusus untuk wilayah 3T, bersama dengan kerangka evaluasi yang komprehensif di tingkat kelembagaan. Jika kebijakan nasional secara efektif mengakomodasi konteks lokal dan memberdayakan unit pendidikan melalui MBS, maka transformasi berkelanjutan dari kualitas pendidikan madrasah akan lebih mudah dicapai di seluruh Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dan program peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah di Indonesia, namun efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di lapangan. Berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Agama, Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan Platform Merdeka Mengajar telah mendukung penguatan kompetensi guru pada aspek pedagogik, profesional, dan teknologi, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya merata dan masih menghadapi hambatan terutama di wilayah 3T yang berkaitan dengan keterbatasan akses pelatihan, infrastruktur, dan teknologi pendidikan. Selain itu, pendekatan kebijakan yang masih cenderung *top-down* menyebabkan program belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kontekstual madrasah di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis kebutuhan lokal melalui penguatan otonomi madrasah, pemerataan akses pelatihan, serta peningkatan dukungan infrastruktur dan teknologi agar peningkatan kompetensi guru PAI dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan madrasah secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Mukhammad. 2019. "School Culture To Serve Performance Of Madrasah In Indonesia." *QIJIS : Qudus International Journal of Islamic Studies* 7(1):71–100. doi: 10.21043/qijis.v7i1.4572.
- Acep Heris Hermawan, Hary Priatna Sanusi, Maemunah Sa'diyah. 2017. "Policy Implementation of Teacher Competence in Practicing Islamic Teaching." *Jurnal Pendidikan Islam* 3(2):191–206. doi: 10.15575/jpi.v3i2.1785.
- Adim Dwi Putranti, Mega Wahyu Rhamadani, Sukmawarti, Asih Utami. 2024. "Effectiveness of Professional Teacher Education in Developing Educational Technology Skills in the Digital Era." *Jurnal of Pedagogi: Jurnal Pendidikan* 1(6):131–39. doi: <https://doi.org/10.62872/xc7ta403>.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyan, S. J. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6 (1):974–980. doi: <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Aini, Masyithoh. 2022. "Desentralisasi Pendidikan Madrasah Melalui Otonomi Daerah Di Indonesia." *Ulu-muddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 12:95–106.
- Amin, Husnul. 2019. "Prpfesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam Di Madrasah." 4:1–10.
- Ani Siti Anisah, Masripah, Mentari Juanda Putri. 2025. "Rethinking Teacher Professional Development for the Digital Era : A Narrative Review." *Eduscape: Journal of Education* 3(4):204–17.
- Anwar Arifin, Ajahari, Misbah, Asmawati, Puspita, M. Andriana Gaffar, Arman Paramansyah. 2023. "Budaya Organisasi Madrasah Dan Kinerja Guru Di MTs

- Insan Cendekia Sanggatta Kab.Kutai Timur.” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5(6):2852–59. doi: 10.47476/reslaj.v5i6.2615.
- Asmuni, Hadiqoh. 2023. “Policy Innovation To Improve The Quality Of School-Based Islamic Education.” *JIMPI: Jurnal Inofatif Manajemen Pendidikan Islam* 02(01):61–70. doi: 10.38073/jimpi.v2i1.1597.
- Aurisélia Rocha Azevedo, Elenilda Teles Frota, Flavia Azevedo Albuquerque Fontenele, Francisca Antonia Araujo de Vasconcelos, Manoel Flávio Coutinho, and Maria José Coutinho de Melo and Tereza Cristina Fernandes França. Maria de Lourdes Rocha da Silva. 2025. “Project-Based Learning and the Challenges of the 21st Century.” *Science and Connections: The Interdependence of Disciplines* Chapter 14.
- Ecih Sukaesih, Ahmad Subagyo. 2025. “Analysis of the Impact of Islamic Education Policy on the Quality of Education Ecih.” *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unipa Surabaya* 21(2):126–32.
- Fahmi, Rizal, Mohamad Bayi Tabrani, and Wawan Setiawardani. 2024. “Kompetensi Pendidik Dalam Menghadapi Pendidikan Pada Era Society 5 . 0.” *AJIE - Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 08(01):8–17.
- Falah, Anta Ibnul, and Agus Heruanto Hadna. 2022. “Problematisasi Pendidikan Masa Pandemi Di Indonesia Pada Daerah 3-T (Terluar, Tertinggal, Dan Terdepan).” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 7(2):164–85. doi: 10.24832/jpnk.v7i2.2997.
- Fang, He, and He Xueyun. 2025. “Core-Competence Educational Policies Versus the Practical Realities of Rural Area-Based Language Teachers : Pathways to Better Policy Implementation.” *SAGE Open* (September):1–17. doi: 10.1177/21582440251360144.
- Fatihin, Moh Khoirul, Nur Asnawi, and M. Fahim Tharaba. 2023. “Transforming Islamic Education : Madrasah-Based Management Strategies for Academic Excellence.” *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 07(04):1145–60. doi: DOI: <http://doi.org/10.33650/al-tanzim.v7i4.6746>.
- Hermawan, Dudi, A. Marjuni, and Muh. Rapi. 2022. “The Role of Teacher Association Regional on Islamic Religious Education in Selayar Islands.” *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 10(2):499. doi: 10.24252/jicsa.v10i2.24776.
- Hernández-sellés, Núria, and Miguel Massigoge-galbis. 2024. “Strengthening Policies for Education , Innovation , and Digitization Through Teacher Training : Evaluating ProFuturo ’ s Open Model in Ecuador.” *International Review of Research in Open and Distributed Learning* 25(4).
- Herry Sanoto, Soesanto, AT Soegito, Kardoyo. 2021. “Pengaruh Supervisi Akademik Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru Di Daerah 3T (Terdepan , Terpentil , Tertinggal).” *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 166–72.
- Huda, Mualimul. 2021. “Aktualisasi Budaya Organisasi Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru.” *Jurnal Penelitian* 15:319–46. doi: DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/jp.v15i2.12494>.
- Husnol Khotimah, Umar Manshur, Abdul Wahid Zaini, M. Aqil Fahmi, and Suhermanto. Sanjani. 2024. “Increasing The Competence Of Islamic Religious Education Teachers From A Madrasah-Based Management Perspective.” *Managere Indonesian Journal Of Education Management* 6(1):13–26. doi: <https://doi.org/10.52627/managere.v6i1.388> Article.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. n.d.-a. “Info, Tunjangan Khusus Guru Madrasah Wilayah 3T Segera Cair.”
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. n.d.-b. “Tahap 1, Kemenag Siapkan Rp73 Miliar Tunjangan Khusus 9.043 Guru Madrasah Daerah 3T.”
- Indonesia, Republik. 2020. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.”

- Irmawati. 2024. "Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kurikulum PAI." *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4(2):1743–57. doi: 10.37680/almikraj.v4i02.5421.
- Iskandar, Wahyu. 2019. "Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah." *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 4(1):1–22.
- Ismail, Mustopa, Ilyas, Imran, Umil Muhsinin. 2024. "The Role of Technology in Improving the Quality of Islamic Religious Education in Schools and Madrasas in the Digital Era." *Journal of Social Science*.
- Kayati, Afiyah Nur. 2020. "Kolaborasi Guru Dalam MGMP Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan Di MTs Unggulan Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto." *SYAIKHUNA: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 11:31–47.
- Khoriah, Aah. 2025. "Implementation of School-Based Management (SBM) in Improving the Quality of Education." *Cristal International Journal of Interdisciplinary Research* 1(2):77–81.
- Lundeto, Adri. 2023. "Empowering Islamic Religious Teachers: Professional Development and Challenges." *International Journal of Science and Society* 5(3):430–50.
- M. Munif, Johannes M. Galvis, Muh Habibullo. 2024. "Utilization of Digital Technology in Enhancing Teachers' Pedagogical Competence." *JELS: Journal of Education and Learning Sciences* 04(02).
- Mardhatillah, Olivia, and Jun Surjanti. 2023. "Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dan Profesionalitas Guru Di Indonesia Melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG)." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 15(1):102–11. doi: <http://doi.org/10.23887/jjpe.v15i1.65200>.
- Martani, Edi. 2023. "Improving the Quality of Madrasah Education through Madrasah Resource Management." *Dawuh Guru: Jurnal Pendidikan MI/SD* 3(1):25–38. doi: <https://doi.org/10.35878/guru.v3i1.481> Improving.
- Muhammad Ybnu T, Eli Retnowati, Maftuhah Dewi, Klemens Mere, Bayu Purbha Sakti. 2024. "Analysis of the Implementation of Training and Development Programs for Teachers in the Context of Curriculum Change: Evaluation and Recommendations." *Dinasti International Journal Of Education Management And Social Science (DIJEMSS)* 5(6):1868–76. doi: 10.38035/dijemss.v5i6.
- Muhtar Hidayat, Sukari. 2025. "Relevansi Kurikulum Pendidikan Islam Di Madrasah Dengan Kebutuhan Dunia Modern." *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2. doi: <https://doi.org/10.61132/moral.v2i1.483>.
- Nurfuadi. 2020. "The Development of Teachers' Pedagogical Competencies of Islamic Religious Education Based on Learning Quality Management." *Jurnal Iqra'Kajian Ilmu Pendidikan* 5(2):151–63. doi: <https://doi.org/10.25217/ji.v5i2.1014>.
- Okta Rosfiani, Bayu Sukmana, Eldrida Andri, Dewi Sukma, Marwatu Saidah. 2025. "Tantangan Dan Solusi Guru PAI Dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Karakter Dalam Pembelajaran Di Era Digital." *TEACHING : Jurnal Inovasi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 5(2):320–28.
- Powa, John Eka, Minnah El Widdah, and Hamdi Zas Pendi. 2023. "Analysis Of Islamic Education Policy in The National Education System Law No . 20 Year 2003." *Journal of Curriculum and Pedagogic Studies (JCPS)* 2(1):1–13.
- Rifa'i, Moh. 2017. "Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Era Otonomi Daerah." 1(1):99–114.
- Rosinta Nur 'Aisyah, Susanti Sufyadi, and Mastur. 2025. "Teacher Competence in Implementing the Pancasila Student Profile Project (P5)." *Vidya Karya* 40(2):149–62.
- Sahat Renol HS, Selvita Eka Eviana Purba. 2025. "The Role Of Artificial Intelligence In Enhancing Learning In The Era Of Society 5.0." *Klasikal: Journal of Education*,

- Language Teaching and Science* 7(2):668–77.
- Santosa, Achadi Budi. 2022. "Organizational Culture as The Basis of Teacher Performance Development." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 06(03):962–73. doi: DOI: <http://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i3.3019>.
- Sayni Nasrah, Sri Milfayetty, Arif Rahman, Muthmainnah. 2025. "Strategic Approaches to Enhancing Teacher Competence in Artificial Intelligence for the Transformation of 21 St Century Education." *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* 8(2):41–52. doi: <https://doi.org/10.32535/jicp.v8i2.4158> Copyright.
- Sitti Muthmainnah, Bahaking Rama. 2024. "Prospek Pengembangan PAI (Studi Tentang Masa Depan Dan Tantangannya)." *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam* 2(2):10–27.
- Sunarya, Ujang. 2024. "Kendala Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Proses Pengembangan Materi Pembelajaran PAII Di Madrasah Tsanawiyah." *Epistemic: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 3(1):149–65. doi: [10.70287/epistemic.v3i1.195](https://doi.org/10.70287/epistemic.v3i1.195).
- Supa'at. 2016. "Identification of the Problems Faced by Madrasahs in Response to Institutional Change." *International Conference on Educational, Management, Administration and Leadership* 14:395–403.
- Supangat. 2022. "Manajemen Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru." *Jurnal Literasiologi* 8(4):70–80.
- Suradi. 2023. "Designing the Integration of Science in Madrasahs." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)* 8(2):771–82.
- Syafia Masnu'ah, Nyanyu Khodijah, Ermis Surya. 2022. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 (SISDIKNAS)." *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 9(20):115–30.
- Tomasouw, Jolanda, Juliaans E. R. Marantika, Eldaa Crystle Wenno, and Carmen Noya Van Delzen. 2024. "The Challenges of the Kurikulum Merdeka Implementation in 3T Area." *KnE Social Sciences* 2024:359–77. doi: [10.18502/kss.v9i31.17598](https://doi.org/10.18502/kss.v9i31.17598).
- Virgiawan Listanto, Citra Permatasari. 2022. "Practical Experience of School-Based Management Development in Madrasahs: A Systematic Literature Review." *Jawda: Journal of Islamic Education Management* 3 (2):198–219.